

Katalog : 4102002.7312

IPM

**KABUPATEN
SOPPENG
TAHUN 2017**

Indeks Pembangunan Manusia



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng 2017

ISBN : 978-602-5551-23-9
Katalog : 4102002.7312
No. Publikasi : 73120.1817
Ukuran Buku : 21 cm x 15 cm
Jumlah Halaman : viii + 27
Naskah/Editor : Asy-Syifa Hanum Farida, SST
Gambar kulit : Asy-Syifa Hanum Farida, SST
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*

<https://soppengkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

“INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017” diterbitkan pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini disusun dalam upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen data terkait data-data pembangunan manusia. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data primer hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng dan data sekunder dari Instansi terkait. Adapula perbandingan antar wilayah kabupaten di sekitar Kabupaten Soppeng yang dapat menunjukkan sejauh mana pembangunan manusia dibandingkan kabupaten disekitarnya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kerjasama yang baik secara berkesinambungan dari berbagai sumber data, serta kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penerbitan publikasi seperti ini di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi konsumen data. Amiin.

Watansoppeng, November 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG

IR. H. R U S T A N
NIP: 196612151993011001

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN KATALOG	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 Metodologi	5
2.1 Konsep dan Definisi	5
2.2 Sumber Data	10
BAB 3 Kondisi Sosial	11
Ekonomi	
3.1 Kependudukan	11
3.2 Kesehatan	13
3.3 Pendidikan	14
3.4 Ketenagakerjaan	15
3.5 Perekonomian	16
BAB 4 Gambaran IPM	
Kabupaten	19
Soppeng	
4.1 Perkembangan IPM	19

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*

4.2 Perbandingan antar Daerah	21
BAB 5 Penutup	27
5.1 Kesimpulan	27

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur utama kondisi perekonomian dari suatu negara. Tidak jarang bahwa keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan negara selalu dinilai dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian di negara tersebut sedang baik dan iklim perekonomiannya cukup stabil. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, menunjukkan bahwa iklim perekonomiannya sedang lesu.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari output yang dihasilkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, perhitungan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada nilai perbandingan produk domestik bruto atau PDB pada tahun tertentu terhadap produk domestik bruto tahun sebelumnya, atau biasa disebut dengan PDB rill. Dimana nilai PDB yang dihasilkan merujuk pada nilai output potensial, yaitu produksi. Untuk menghasilkan nilai output ini diperlukan input yang berupa modal dan tenaga kerja. Seberapa besar kebutuhan akan tenaga kerja, tergantung pada kebutuhan masing-masing sektor dan produktifitas tenaga kerja.

Berdasarkan data sensus penduduk 2010, tercatat bahwa 66% dari total penduduk Indonesia berada pada usia 15 hingga 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif, atau bisa dikatakan penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun, dalam evolusi kependudukan yang dialaminya (BKKBN). Kondisi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2035 berdasarkan angka proyeksi penduduk Indonesia.

Kondisi bonus demografi ini memberikan suatu keuntungan bagi perekonomian. Banyaknya tenaga kerja usia produktif dinilai

mempunyai produktifitas yang tinggi. Sehingga, output yang dihasilkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan *The Conference Board Productivity Brief 2015*, yang menyatakan bahwa produktivitas adalah hal yang sederhana akan tetapi menjadi indikator yang paling kuat untuk melihat kemampuan suatu negara dalam mengoptimalkan perekonomian. Selain itu, meningkatnya output juga akan meningkatkan pendapatan tenaga kerjanya. Sehingga kesejahteraan tenaga kerja pun juga ikut meningkat.

Akan tetapi, adanya bonus demografi ini tidak serta merta mampu menunjang perekonomian. Seberapa besar pendapatan yang akan mereka terima tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi ini merupakan input dari tenaga kerja, atau yang disebut sebagai modal manusia. Menurut Todaro (2009), modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, dan kesehatan. Semakin tinggi modal manusia yang dimiliki seseorang menyebabkan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa juga meningkat. Sejalan yang dilansir oleh *Human Development Report (1990)*, “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”.

Pentingnya kualitas dari sumber daya manusia ini menjadikan pemerintah mulai berkonsentrasi untuk membangun kualitas manusia. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia, digunakanlah indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah bentuk standar dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah, sehingga angka IPM akan dapat dibandingkan antar wilayah.

Sebagai instansi penyedia data statistik, BPS Kabupaten Soppeng dituntut untuk dapat menyediakan data IPM Kabupaten Soppeng. Melalui publikasi ini, diharapkan akan memberikan gambaran secara deskriptif mengenai perkembangan IPM di Kabupaten Soppeng, sehingga dapat menjadi bahan masukan pemerintah daerah dalam membangun manusianya.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai gambaran secara umum perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Soppeng. Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan data untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rencana kebijakan selanjutnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Pada Bab 1 akan diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan publikasi ini. Kemudian di Bab 2 akan diulas mengenai metodologi, yang terdiri dari konsep definisi, meliputi IPM, angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli. Selain itu juga akan ada ulasan terkait sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Selanjutnya pada Bab 3 akan dibahas terkait kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Soppeng yang meliputi gambaran kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perekonomian. Ulasan mengenai perkembangan IPM beserta perbandingan antar daerah akan dibahas pada Bab 4. Kemudian Bab 5 adalah penutup yang berisi kesimpulan.

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 2 METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Oleh karena itu, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*).

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertama kali dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM mempunyai manfaat antara lain:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;

- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibangun oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi ini mempunyai pengertian yang luas terkait indikator-indikator pengukurannya. Pada dimensi kesehatan, digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dalam pengukurannya. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*).

Indikator-indikator tersebut merupakan indikator baru dalam perubahan metodologi penghitungan IPM. Perubahan metodologi penghitungan ini didasarkan pada beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan lagi. Seperti angka melek huruf, sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita juga tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu, perubahan juga terjadi pada rumus penghitungannya, yang semula menggunakan rata-rata aritmatik, berubah menjadi rata-rata geometrik.

Adapun rumus penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Nilai indeks yang dihasilkan, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yakni:

- a. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- b. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- c. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- d. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Layaknya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}}$$

Berikut standar nilai yang digunakan BPS dalam penghitungan IPM berdasarkan UNDP.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunakan dalam Penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maks	Min	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352*	1.007.436**	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Keterangan: *) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Kabupaten Tolikara, Papua.

**) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran perkapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Sumber: BPS 2016

2.1.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya AHH dapat diartikan bahwa terdapat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi dan membaiknya kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

Rumus yang digunakan dalam menghitung dimensi kesehatan adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan/pendidikan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS juga dapat digunakan sebagai

indikator kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam suatu wilayah.

Dimensi pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

2.1.4 Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

Badan Pusat Statistik mengukur dimensi standar hidup layak menggunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao. Berikut rumus penghitungan yang digunakan:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

2.1.5 *Shortfall*

Membandingkan antara capaian yang telah ditempuh pada suatu periode tertentu dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai suatu titik ideal dalam menganalisis IPM, digunakanlah suatu penghitungan yang disebut *shortfall*. Capaian suatu indikator dikatakan “cepat” apabila nilai *shortfall* di atas 1,7 dan dikatakan “menengah” apabila nilai *shortfall* di atas 1,5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{I_t - I_{t-1}}{100 - I_{t-1}} \times 100$$

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*

Keterangan :

r : *Shortfall*

I_t : Indeks pada tahun t

I_{t-1} : Indeks pada setahun yang lalu atau pada tahun $t-1$

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data yang dimiliki seksi Neraca, berupa data IPM dan indikator penyusunnya. Selain itu, data-data sosial ekonomi lainnya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 3
KONDISI SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 berkisar 227.545 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 89. Artinya, dari 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 89 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Soppeng lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

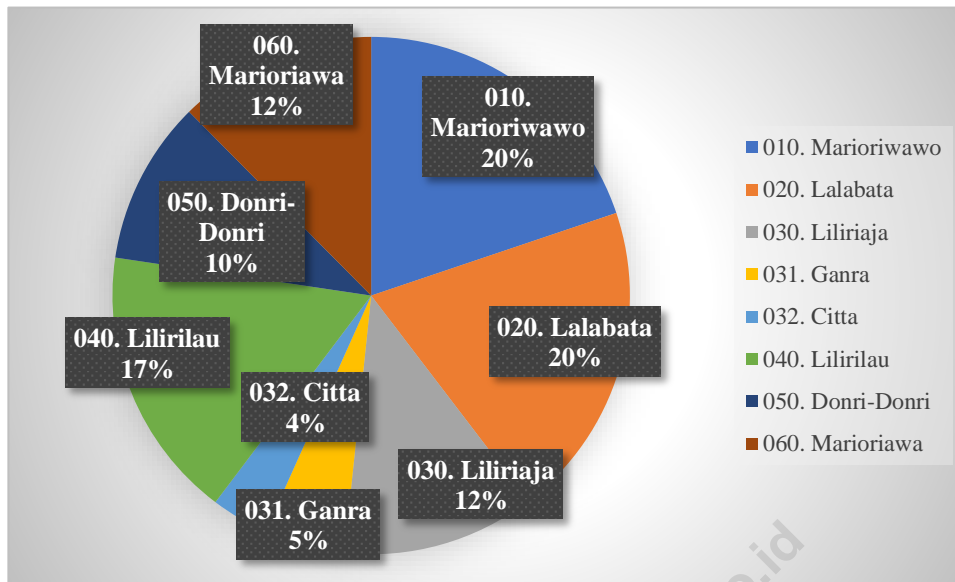
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	106.111	119.401	225.512	89
2014	106.206	119.503	225.709	89
2015	106.420	119.695	226.115	89
2016	106.806	120.061	226.867	89
2017	107.156	120.389	227.545	89

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2015-2017

Jika melihat menurut kecamatan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Marioriwawo dan Kecamatan Lalabata yang masing-masing menyumbang 20 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng. Hal ini dikarenakan Kecamatan Marioriwawo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Soppeng, sedangkan Kecamatan Lalabata merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Lombok.

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*



Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2018

Grafik 3.1 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Marioriwawo	300	44 899	149,66
020. Lalabata	278	44 828	161,25
030. Liliriaja	96	27 244	283,79
031. Ganra	57	11 448	200,84
032. Citta	40	8 101	202,53
040. Lilirilau	187	38 650	206,68
050. Donri-Donri	222	23 162	104,33
060. Marioriawa	320	28 134	87,92
Jumlah	1 500	226 466	150,98

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2018

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Soppeng terlihat belum merata, atau terdapat ketimpangan. Hal ini terlihat dari

kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan yang cukup timpang. Pada tabel 3.1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Liriaja merupakan kecamatan terpadat, dimana kepadatan penduduknya mencapai 283,79 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Marioriawa merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Kecamatan Marioriawa, dimana dengan wilayah yang luas, sebagian besarnya merupakan pegunungan dan hutan.

3.2 Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng terbilang sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh telah tersedianya rumah sakit, praktek dokter, puskesmas hingga puskesmas pembantu yang tersebar diseluruh kecamatan. Adanya fasilitas kesehatan ini, ditunjang juga oleh tersedianya tenaga medis yang cukup. Berikut data statistik kesehatan Kabupaten Soppeng.

Tabel 3.3 Statistik Kesehatan Kabupaten Soppeng

Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Fasilitas Kesehatan			
Rumah Sakit	1	1	1
Praktek Dokter	51	51	35
Puskesmas	17	17	17
Pustu	44	44	44
Tenaga Kesehatan			
Bidan	103	80	100
Perawat	253	148	143
Dokter Umum	42	23	14
Dokter Gigi	19	17	14

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2018

Meningkatnya jumlah bidan ini sejalan dengan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan angka kelahiran, yaitu melalui tenaga medis penolong kelahiran yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah

hingga pedesaan. Pada tahun 2017, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis mencapai 99,91 persen, dimana persentase ini mampu dipertahankan sejak tahun 2015.

3.3 Pendidikan

Salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas manusia adalah melalui pendidikan. Pada tahun 2017, partisipasi sekolah anak umur 16 sampai dengan 18 tahun meningkat 8,79 persen. Hal ini ditunjang oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang berupa 370 sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain itu terdapat 3.835 guru yang tersebar di seluruh Kabupaten Soppeng, dimana setiap guru rata-rata mengajar 8 sampai dengan 12 murid.

Tabel 3.4 Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Uraian	2017
(1)	(2)
Sekolah	370
SD/MI	270
SMP/Mts	69
SMA/MI/SMK	31
Guru	3.835
SD/MI	1.935
SMP/Mts	1.007
SMA/MI/SMK	893
Rasio	10,32
SD/MI	11,24
SMP/Mts	8,39
SMA/MI/SMK	10,52
Angka Partisipasi Sekolah	
7-12	98,78
13-15	94,51
16-18	77,91

Sumber : Kabupaten Soppeng
dalam Angka Tahun
2018

3.4 Ketenagakerjaan

Dari seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, lebih dari setengahnya merupakan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 56,29 persen pada tahun 2015 menjadi 60,84 persen pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan tingkat kesempatan kerja yang juga meningkat dari 97,04 persen menjadi 97,29 persen pada tahun yang sama. Peningkatan ini diikuti oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 2,96 persen menjadi 2,71 persen.

Tabel 3.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten
Soppeng Tahun 2015 dan 2017

Uraian	2015	2017
(1)	(2)	(3)
TPAK (%)	56,29	60,84
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,96	2,71
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,04	97,29

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2016 dan BPS Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2017

Menurut lapangan pekerjaan utamanya, 45,98 persen pekerja di Kabupaten Soppeng bekerja pada sektor pertanian. Diikuti sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 18,27 persen. Sedangkan industri pengolahan hanya sekitar 6,27 persen pada tahun 2017. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 3.6 Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	47.015	45,98
Industri Pengolahan	6.409	6,27

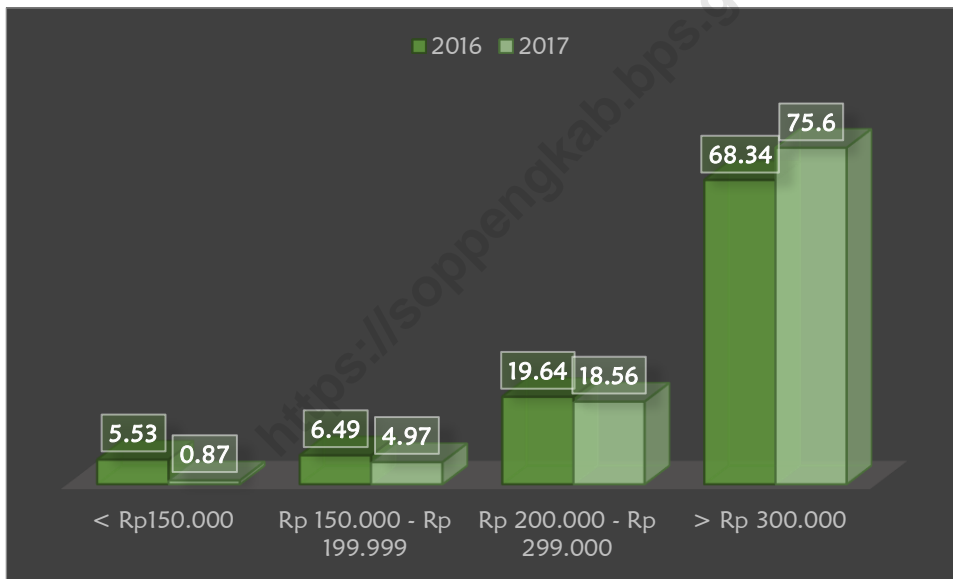
**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017**

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel	18.677	18,27
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	18.558	18,15
Lainnya	11.580	11,33

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

3.5 Perekonomian

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya jumlah penduduk yang pengeluaran perkapitanya di atas 300.000 rupiah.

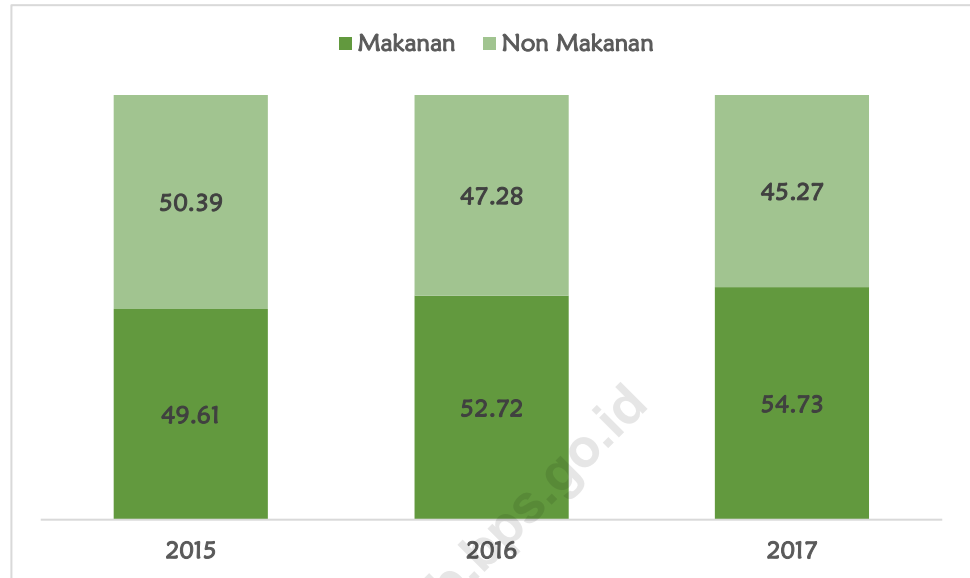


Sumber : Susenas Tahun 2016-2017

**Grafik 3.2 Persentase Penduduk menurut Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017**

Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Berdasarkan Grafik 3.3 di bawah ini, persentase pengeluaran untuk makanan masih lebih besar daripada non-makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Soppeng mengalami penurunan yang disebabkan konsumsi makanannya semakin lebih besar daripada konsumsi non-makanan.



Sumber : Susenas Tahun 2015-2017

Grafik 3.3 Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non-makanan Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2017

<https://soppengkab.bps.go.id>

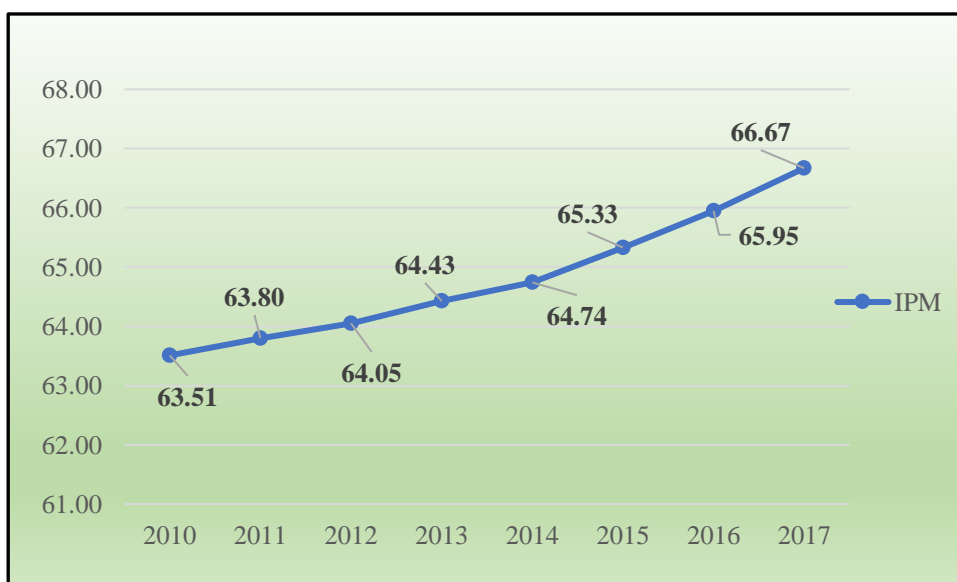
BAB 4

GAMBARAN IPM KABUPATEN SOPPENG

4.1 Perkembangan IPM

Tujuan utama pembangunan adalah terciptanya lingkungan yang mendukung masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat dan produktif dalam menjalani kehidupan. Tujuan ini akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan tinggi, serta memperoleh pendapatan yang cukup untuk menunjang kehidupannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur pembangunan, tidak terkecuali pembangunan di Kabupaten Soppeng. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dari yang semula 63,51 pada tahun 2010, meningkat secara perlahan menjadi 66,67 pada tahun 2017. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada komponen-komponen penyusun IPM itu sendiri. Apa yang telah dicapai, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam komitmennya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.



Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2017

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.1.1 Komponen-komponen Penyusun IPM Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	68,03	11,33	6,81	8.186	63,51
2011	68,15	11,36	6,81	8.351	63,80
2012	68,26	11,39	6,81	8.489	64,05
2013	68,37	11,42	6,93	8.603	64,43
2014	68,42	11,45	7,04	8.699	64,74
2015	68,52	11,81	7,05	8.835	65,33
2016	68,62	12,20	7,06	8.965	65,95
2017	68,72	12,33	7,42	9.035	66,67

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 4.1.1 terlihat bahwa pada tahun 2010-2017, nilai IPM Kabupaten Soppeng yang berkisar antara 60 sampai dengan 70, berada dalam kategori sedang. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Soppeng meningkat 3,16 poin dengan rata-rata pertumbuhan 0,7 persen setiap tahunnya. Peningkatan level tertinggi IPM di Kabupaten Soppeng terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 0,72 poin.

Melihat dari capaian setiap komponen IPM, harapan hidup penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mencapai usia 69 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Soppeng sudah cukup baik. Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mencapai 12 tahun, atau dapat diartikan harapan penduduk bisa menikmati pendidikan sampai dengan tamat sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan rata-rata lama sekolahnya hanya 7 tahun atau setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) tetapi tidak sampai tamat. Selanjutnya dari sisi pengeluaran, rata-rata pengeluaran setiap penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar Rp 9.035.000,00 setahun atau Rp 752.917,00 sebulan.

4.2 Perbandingan Antar Daerah

Pembangunan daerah tidak dapat lagi bertumpu hanya pada peningkatan produksi atau peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan melalui sektor perekonomian saja. Kondisi kependudukan yang terkait dengan peluang untuk hidup panjang, dapat berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan, dan menikmati hidup yang layak dinilai akan lebih mampu digunakan sebagai paradigma pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang berorientasi pada manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat pembangunan.

Penerapan otonomi daerah yang dimulai sejak masa reformasi, yakni pada tahun 1999, menyebabkan setiap daerah mulai belajar untuk membangun daerahnya secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini menyebabkan roda pembangunan dalam pelaksanaannya terfokus pada wilayah kabupaten/kota. Tak terkecuali pembangunan manusia yang diulas pada pembahasan ini, dimana untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu diukur pada masing-masing kabupaten/kota, tidak terkecuali Kabupaten Soppeng.

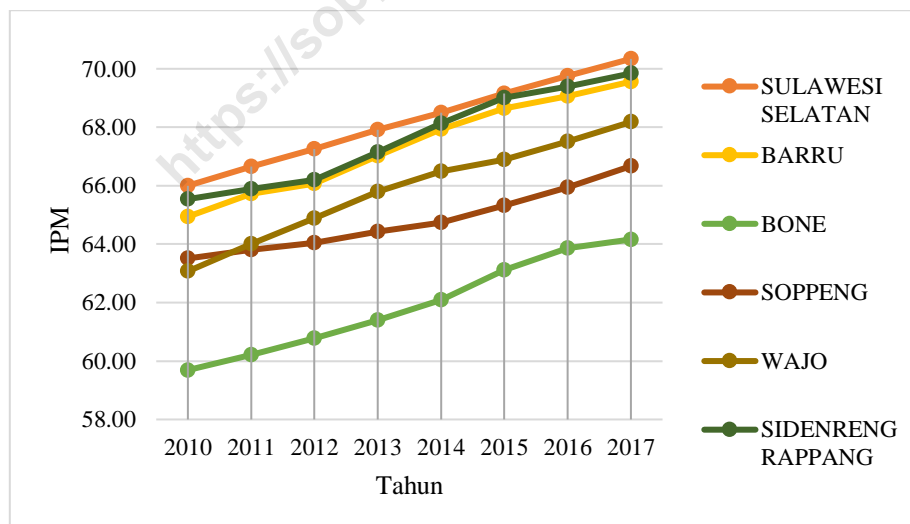
Untuk melihat sejauh mana tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Soppeng, perlu adanya perbandingan dengan wilayah lain, dalam hal ini kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung secara geografis dengan Kabupaten Soppeng. Kabupaten-kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, pada pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng Tahun 2017

selanjutnya merupakan pembahasan terkait perbandingan IPM dan komponen penyusunnya Kabupaten Soppeng dan wilayah-wilayah disekitarnya.

4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Melihat tren dari tahun 2010 sampai dengan 2017, angka IPM Kabupaten Soppeng menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, kondisi IPM di Kabupaten Soppeng masih di bawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten disekitarnya, Kabupaten Soppeng tergolong cukup rendah, bahkan menempati peringkat dua terbawah. Meningkatnya IPM dari tahun ke tahun di Kabupaten Soppeng ternyata belum mampu mengejar kabupaten-kabupaten disekitarnya, walaupun masih lebih tinggi daripada Kabupaten Bone.

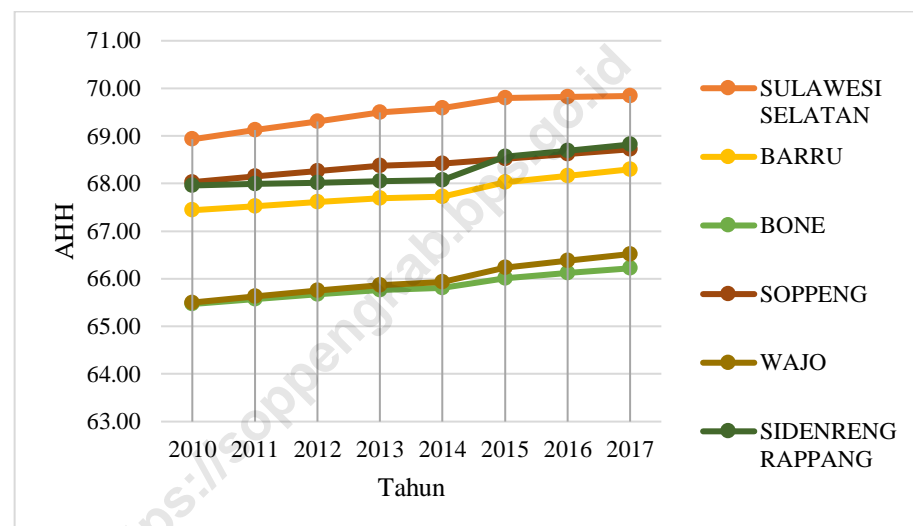


Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2010-2017

Grafik 4.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2017

4.2.2 Angka Harapan Hidup

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Melihat pada Grafik 4.3, AHH Kabupaten Soppeng terbilang cukup tinggi dibandingkan empat kabupaten disekitarnya, bahkan menduduki posisi dua teratas yang hampir serupa dengan Kabupaten Sidrap. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Soppeng terbilang cukup baik, sebab harapan seseorang untuk Panjang umur tergolong tinggi.



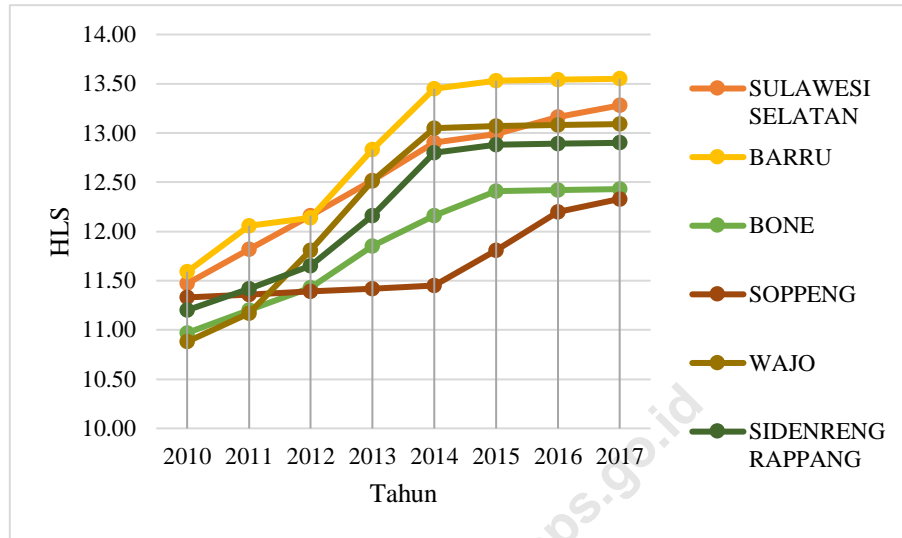
Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2010-2017

Grafik 4.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2017

4.2.3 Harapan Lama Sekolah

Salah satu indikator untuk mengukur dimensi Pendidikan adalah dengan menghitung Harapan Lama Sekolah (HLS). Melihat dari Grafik 4.4 di bawah, HLS Kabupaten Soppeng menjadi yang terendah di antara empat kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seseorang mendapat pendidikan di Kabupaten Soppeng tidak terlalu tinggi, atau dengan kata lain

harapan seseorang untuk sekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi masih rendah.



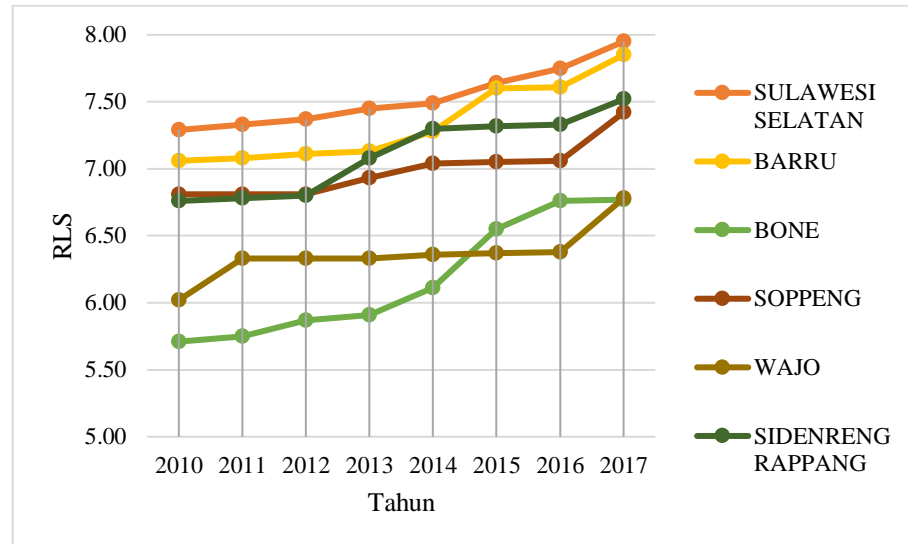
Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2010-2017

Grafik 4.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2017

4.2.4 Rata-rata Lama Sekolah

Dari tahun 2010 sampai dengan 2017, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini bahkan lebih tinggi dari Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, dimana harapan lama sekolah mereka cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng lebih mendekati pada harapan lama sekolahnya.

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*



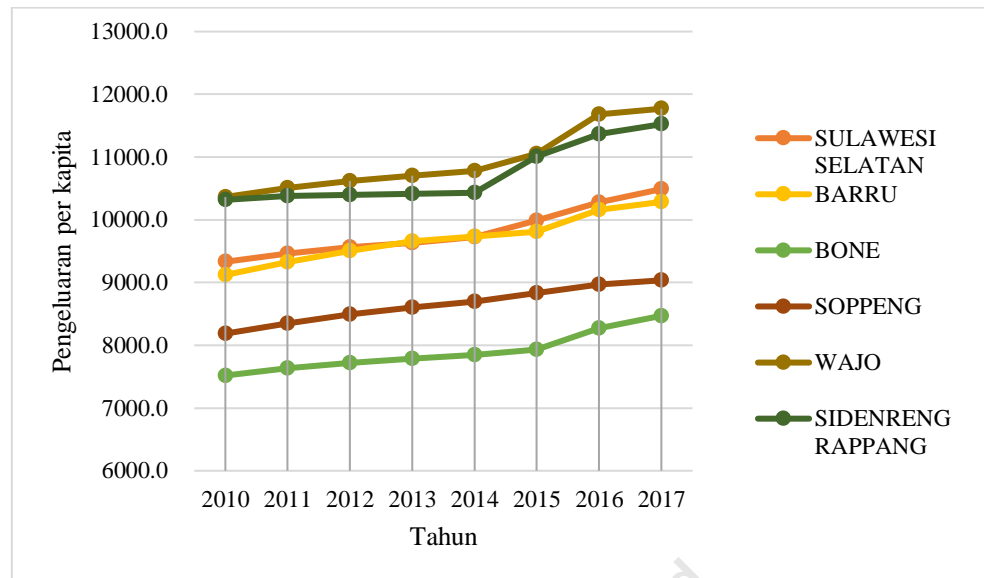
Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2010-2017

Grafik 4.5 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2017

4.2.5 Pengeluaran Perkapita

Untuk mengukur dimensi daya beli, BPS menggunakan konsumsi perkaita sebagai variabel proxy pengukuran pendapatan perkapita. Melihat pada Grafik 4.6 di bawah ini, pengeluaran perkapita di Kabupaten Soppeng masih tergolong rendah walaupun trennya menunjukkan tren yang positif. Dibandingkan keempat kabupaten sekitarnya, pengeluaran perkapita di Kabupaten Soppeng berada pada peringkat kedua dari bawah dan di bawah nilai provinsi.

*Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Soppeng Tahun 2017*



Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2010-2017

Grafik 4.6 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2017

**BAB 5
PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

IPM Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 65,95 menjadi 66,67 pada tahun 2017. Peningkatan ini lebih disokong oleh AHH yang cukup tinggi.

IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, dimana Kabupaten Soppeng menempati urutan dua terbawah. Melihat dari komponen penyusunnya, perlu adanya perbaikan di bidang pendidikan dan kesejahteraan perekonomiannya.

<https://soppengkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://soppengkab.bps.go.id>



ISBN 978-602-5551-23-9



9 786025 551239



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo, Watansoppeng. Telp (0484) 21060, Fax (0484) 23377

Homepage: <http://soppengkab.bps.go.id> Email: soppengkab@bps.go.id